

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2019 - 2024

TAHUN 2019 - 2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN 2019 - 2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 (0293) 788346 Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511
website : www.magelangkab.go.id e-mail : kominfo@magelangkab.go.id

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ENDRA ENDAH WACANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198903 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika ...	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	32
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	34
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DISKOMINFO KABUPATEN MAGELANG	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DISKOMINFO KABUPATEN MAGELANG	58
BAB VIII PENUTUP	61

DAFTAR TABEL	iv
TABEL 2.1. SDM Diskominfo Berdasarkan Kelompok Jabatan ...	19
TABEL 2.2. Jenjang Pendidikan SDM pada Diskominfo	19
TABEL 2.3. SDM pada Diskominfo Menurut Golongan	20
TABEL 2.4. Sarana dan Prasarana di Diskominfo	20
TABEL 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Magelang 2019-2024	23
TABEL 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Diskominfo Kab. Magelang	24
TABEL 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diskominfo	29
TABEL 3.2. Telaah, Visu, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	32
TABEL 3.4. Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	34
TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Kabupaten Magelang	39
TABEL 5.1. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten magelang Tahun 2019-2024	40
TABEL 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Diskominfo	44
TABEL 7.1. Penetapan IKU Diskominfo Kab. Magelang	58
TABEL 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	59
CASCADING DISKOMINFORMASI KABUPATEN MAGELANG	
CODING	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif maka diperlukan perencanaan yang baik yang dapat memberikan arah kebijakan yang jelas dalam kurun waktu yang ditentukan. Arah kebijakan perlu disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada antara lain permasalahan, potensi, peluang serta tantangan kedepan yang akan dihadapi. Untuk hal tersebut maka diperlukan sebuah rencana strategis. Mengacu Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, Rencana strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen bagi sebuah organisasi yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan wajib dan/ urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 2019-2024 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat daerah adalah persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, penetapan Renstra.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Daerah dalam komunikasi dan informasi kepada pihak terkait di dalam organisasi pemerintahan maupun

diluar organisasi pemerintahan (masyarakat). Muatan dalam kegiatan ini adalah terkomunikasinya informasi-informasi kinerja pemerintahan melalui berbagai saluran secara masif pada berbagai media baik cetak, elektronik maupun tatap muka yang muaranya adalah terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan itu perencanaan sumber daya, baik manusia maupun infrastruktur, tata kelola dan operasionalnya perlu disusun dan dijabarkan secara bertahap melalui program dan kegiatan dengan memperhatikan permasalahan, potensi, peluang serta tantangan kedepan dengan target tertentu yang harus ditetapkan. Dalam hal ini keterkaitan dengan perencanaan jangka menengah (RPJM) baik yang ada pada Pemerintah Pusat baik yang makro maupun khusus pada Kementerian/Lembaga terkait, Provinsi, Daerah Kabupaten dan rencana kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten menjadi acuan agar tidak terjadi tumpang tindih serta dapat menjadi faktor pendorong percepatan terhadap sasaran, target, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 akan digunakan sebagai pedoman manajerial strategis penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika selama lima tahunan. Perubahan Renstra ini digunakan sebagai dasar (dan tolok ukur) dalam penilaian kinerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
15. Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah untuk memberikan arah atau panduan bagi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tugas dan fungsinya untuk jangka menengah dan adanya keterpaduan dalam kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun tujuannya adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antara Diskominfo dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta untuk megoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja (renja) Diskominfo Kabupaten Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana strategis dilengkapi dengan pengertian dan fungsi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Diskominfo Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Diskominfo Kabupaten Magelang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini, diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Renstra Diskominfo Kabupaten Magelang, telaah Visi, Misi dan Program Bupati terpilih, telaah Perubahan Renstra Kementrian Kominfo dan Perubahan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kabupaten Magelang beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Magelang selama lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Diskominfo Kabupaten Magelang termasuk indikator kinerja utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang secara umum memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh informasi dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun tatap muka. Pada dasarnya semua tugas fungsi tersebut diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut telah tersedia sumberdaya manusia maupun peralatan yang cukup memadai yang dapat diketahui dari capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya meningkatnya akses komunikasi masyarakat dengan pemerintah daerah melalui media elektronik.

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Magelang masih ada hambatan yang dihadapi. Hambatan utama dalam proses komunikasi dan informasi adalah belum semua data informasi terstruktur dengan baik sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Kendala ini lebih disebabkan pada kemampuan dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang berbeda dari segi sumber daya manusia dan prasarana sarana serta regulasi yang masih belum memadukan dalam hal data informasi yang diperlukan dengan sistem satu data.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dengan struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan uraian tugasnya, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2. Uraian Tugas

a. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

a.1. Tugas:

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada pimpinan.

a.2. Uraian Tugas:

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Komunikas dan Informatika.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan di bidang sumber daya informatika.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi publik.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan di bidang aplikasi informatika dan statistik sektoral.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 9) Menyelenggarakan fasilitasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.
- 11) Menyelenggarakan pelayanan di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral
- 12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik sektoral.

- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 14) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.2. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberipetunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 17) Mengerahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA INFORMATIKA

c.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Informatika yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang layanan persandian, telekomunikasi, infrastruktur jaringan informatika, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c.2. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Sumber Daya Informatika.
- 2) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center*, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah, layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses *internet*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, integrasi layanan publik dan pemerintahan, serta layanan persandian.
- 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan infrastruktur dasar *data center* dan *disaster recovery center*.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan pengembangan *intranet* dan penggunaan akses *internet*.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan integrasi layanan publik dengan pemerintahan.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang layanan persandian, telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan informatika.
- 10) Melaksanakan verifikasi pengelolaan data dan informasi di bidang layanan persandian, telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan informatika.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang layanan persandian, telekomunikasi, dan infrastruktur jaringan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Sumber Daya Informatika.

- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Informatika.
- 14) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

d.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang layanan informasi publik, komunikasi publik, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d.2. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- 2) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan.
- 3) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan informasi.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan konten lintas sektoral.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan penyediaan akses.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyediaan akses bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang layanan informasi publik dan komunikasi publik.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIKA

e.1. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Statistika yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang aplikasi informatika, statistik, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e.2. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberipetunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK smart City, layanan manajemen data dan informasi.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan keamanan informasi e-Government.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan dan pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah .
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-Government.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan layanan statistik.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang aplikasi informatika dan statistik.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang aplikasi informatika dan statistik.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang aplikasi informatika dan statistik.

- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

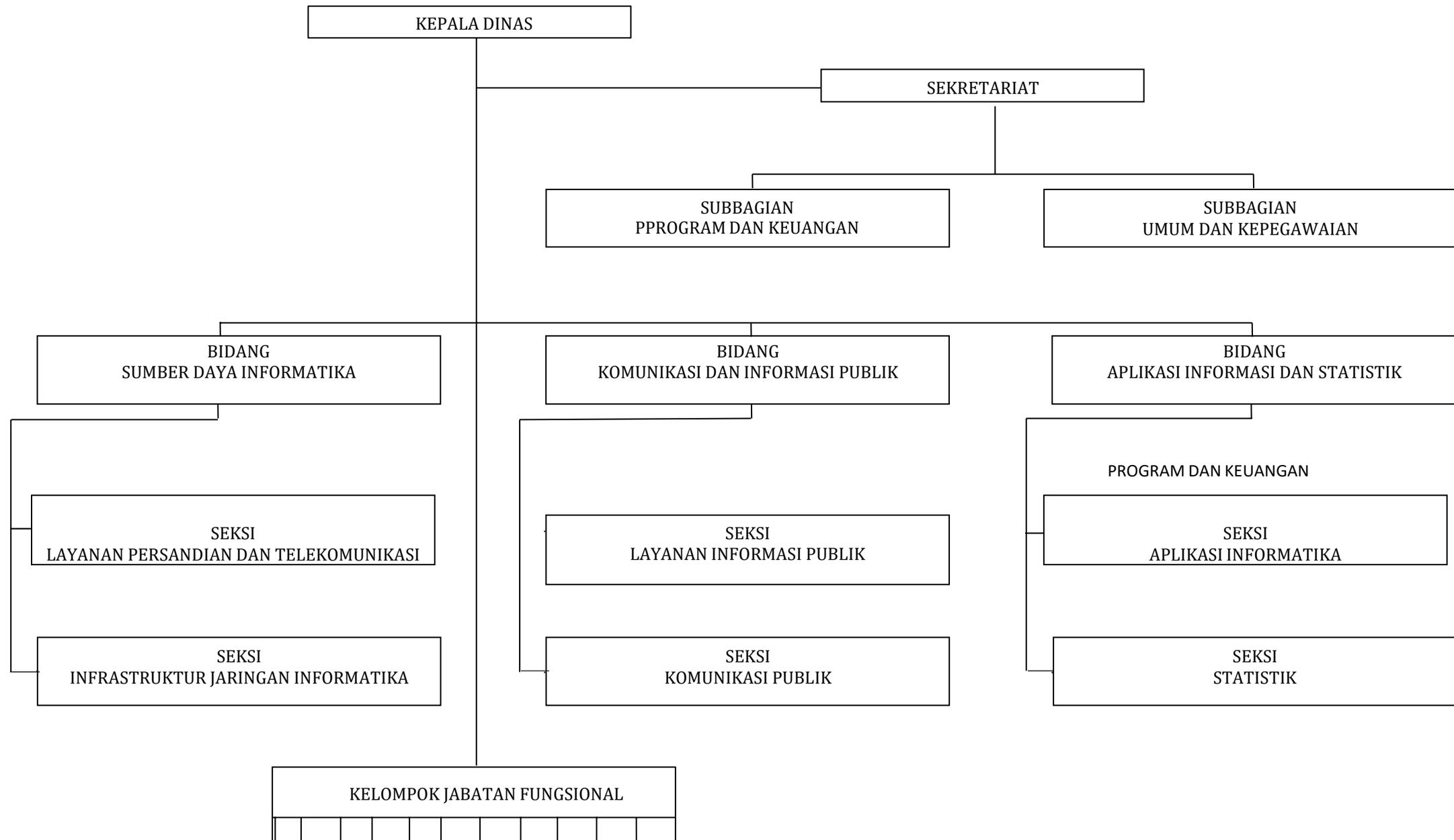
2.1.4. Struktur Organisasi:

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat. membawahi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Informatika, membawahi:
 1. Seksi Layanan Persandian dan Telekomunikasi; dan
 2. Seksi Infrastruktur Jaringan Informatika.

- d. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:
 - 1. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
 - 2. Seksi Komunikasi Publik.
- e. Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik, membawahi:
 - 1. Seksi Aplikasi Informatika; dan
 - 2. Seksi Statistik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang perlu didukung sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Magelang sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata 2. Dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang terdapat 10 jabatan struktural baik eselon II, III maupun eselon IV. Secara rinci SDM Diskominfo Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
SDM Diskominfo berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	Struktural	Kepala Dinas	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	3	3
		Kepala Sub.Bid / Sub Bagian	IV.A	7	8
2	Fungsional Umum	Staf	-	21	46
3	Fungsional Tertentu	Staf	-	5	28
Jumlah				38	87

Sumber: Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, Diskominfo, 2021

Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.1 personil atau pegawai pada Diskominfo Kabupaten Magelang sebanyak 36 orang, terdiri dari 10 orang pejabat struktural dan 26 orang pejabat fungsional umum/fungsional tertentu. Dilihat dari jenjang pendidikannya, SDM pada Diskominfo mayoritas merupakan lulusan S1 (33,34%) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Pasca sarjana (S 2)	7	18,42
2.	Sarjana (S 1)	14	36,85
3.	Diploma 3/Akademi	8	21,05
4.	SLTA	9	23,68
5.	SLTP	0	0
6.	SD	0	0
JUMLAH		38	100,00

Sumber: Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, Diskominfo, 2021

Sedangkan SDM pada Diskominfo Kabupaten Magelang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 55,56% dan golongan II sebanyak 36,11% sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	6	15,79
2.	Golongan III	19	50,00
3.	Golongan II	13	34,21
4.	Golongan I	0	0
JUMLA H		38	100,00

Sumber: Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Diskominfo, 2021

2.2.2. Prasarana dan Sarana

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Prasarana dan Sarana yang telah dimiliki saat ini sebagaimana dalam tabel 2.7.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana di Diskominfo

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG
1	TANAH	1
2	KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2	16
3	GPS	3
4	RAK BESI / METAL /KAYU	12
5	LEMARI	37
6	FILLING BESI / METAL	14
7	MEJA	73
8	KURSI	158
9	P.C. UNIT	22
10	CPU	74
11	MONITOR	75
12	AC SPLIT/ UNIT	27

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG
13	LAPTOP/ NOTEBOOK	29
14	PRINTER	50
15	SERVER/ MAINFRAME	15
16	UPS	123
17	JARINGAN INTERNET SETDA	1
18	ANTENA WIRELESS	78
19	RADIO WIRELESS	67
20	TOWER	33
21	NETWORK SWITCH	139
22	ROUTER	45
23	GROUNDING/ ANTI PETIR	33
24	STABILIZER	28
25	WALLMOUNT/ RACKMOUNT	53
26	ACCES POINT	67
27	PROTECTION/ TOWER/ LISTRIK	42
28	INSTALASI LAN	6
29	JARINGAN LISTRIK KANTOR-GENSET	2
30	MESIN GENERATOR/GENSET	3
31	TELEVISI	19
32	LCD PROYEKTOR	4
33	PEMANCAR RADIO FM	1
34	INSTALASI KELISTRIKAN LINK PEMANCAR	1
35	MESIN ABSENSI	152
36	JARINGAN FO R.BANGDA-R.BUPATI	2
37	INTERIOR COMMAND CENTER	1
38	CALL CENTER	1
39	STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	2
40	GEDUNG KERJA /SERVER/LPPL	4
41	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bila melihat struktur organisasi maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi perangkat daerah Diskominfo, sehingga peran dan fungsi Diskominfo saat ini dan dimasa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dengan segala kendala dan keterbatasan untuk mewujudkan pelaksanaan ideal dimaksud, maka pola dan alur kerja di atas diharapkan dapat terwujud dalam rangka aktualisasi dan orientasi peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, khususnya dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang merupakan Pembantu Bupati dalam bidang persandian, statistik, komunikasi dan informatika memiliki tujuan “Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan bersih” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat”. Diskominfo telah melaksanakan kegiatan di bidang/urusan tersebut dan memiliki 2 (dua) indikator yang mencakup standart pelayanan minimal (SPM) yang diatur oleh Kementerian Kominfo, yaitu:

- a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi**
- b. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho**

Secara umum gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8. Indikator tujuan, sasaran dan program Diskominfo tersebut sebagian sudah tidak sesuai/selaras dengan tujuan, sasaran RPJMD Kab. Magelang 2019-2024 sehingga indikator tujuan, sasaran dan program Diskominfo yang tertuang dalam Renstra Diskominfo 2019-2024 adalah indikator baru yang sudah disesuaikan dengan indikator Kementerian Kominfo, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kab. Magelang 2019-2024

Tabel 2.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Diskominfo Kabupaten Magelang 2019-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi				44,68 <i>persen</i>	53,19 <i>persen</i>	61,70 <i>persen</i>	68,08 <i>persen</i>	76,59 <i>persen</i>	76,59 <i>persen</i>	57,63 <i>persen</i>	75,24
2	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD				48,16 <i>persen</i>	56,89 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	53,37 <i>persen</i>	53,37
3	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik				84,00 <i>persen</i>	86,66 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	80,18 <i>persen</i>	80,18
4	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI				75,06 <i>persen</i>	83,33 <i>persen</i>	86,81 <i>persen</i>	92,80 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	100 <i>persen</i>	82,02 <i>persen</i>	82,02

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Uraian	Anggaran tahun pada ke					Realisasi Anggaran		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		14.155.610.425,00	10.727.298.844,00	10.709.506.086,00	11.350.377.970,00				
		14.155.610.425,00	10.727.298.844,00	10.709.506.086,00	11.350.377.970,00				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.334.089.733,00	4.886.470.475,00	4.886.470.475,00	4.886.470.475,00				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.081.035,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		6.055.390,00		0,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.495.000,00	4.924.955,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.494.500,00	4.905.180,00		0,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.156.080,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		1.150.210,00		0,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.723.426.623,00	4.181.470.475,00	4.181.470.475,00	4.181.470.475,00		3.325.636.592,00		0,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.649.357.303,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00		3.251.605.482,00		0,89

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		48.300.000,00	0	0	0		48.300.000,00		1
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		19.071.160,00	81.470.475,00	81.470.475,00	81.470.475,00		19.065.750,00		0,99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2.054.740,00	0	0	0		2.045.220,00		0,99
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.123.870,00	0	0	0		1.116.850,00		0,99
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.659.690,00	0	0	0		1.649.350,00		0,99
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.446.800,00	0	0	0		1.440.880,00		1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		413.060,00	0	0	0		413.060,00		1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.030.325.250,00	131.000.000,00	131.000.000,00	131.000.000,00		1.879.336.374,00		0,93
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		0		0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2.030.325.250,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		1.879.336.374,00		0,93
		36.211.900,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		35.807.520,00		0,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.288.580,00	36.211.900,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	110.245.920,00	35.807.520,00		0,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0		0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	0	0	0	0	0		0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0	0	0	0	0		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.919.855,00	247.000.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00		199.141.052,00		0,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.000.000,00	21.999.855,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	36.998.455,00	21.994.355,00		0,99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		223.920.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00		177.146.697,00		0,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		287.304.620,00	247.000.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00		241.148.468,00		0,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		180.248.015,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		150.157.473,00		0,83
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		75.917.810,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		59.856.950,00		0,79
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	372.679.978,00	31.138.795,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	319.026.965,00	31.134.045,00		0,99
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.351.603.582,00	1.183.373.490,00	1.183.373.490,00	1.183.373.490,00		1.285.457.454,00		0,95
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		540.599.605,00	322.103.555,00	322.103.555,00	322.103.555,00		535.276.145,00		0,99

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		809.455.944,00	701.269.935,00	701.269.935,00	701.269.935,00		750.181.309,00		0,93
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		0	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		0		0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		0	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		0		0
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									
Pengelolaan Nama domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5.140.551.000,00	3.799.840.429,00	3.782.047.671,00	4.422.919.555,00		5.046.086.215,00		0,98
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		5.140.551.000,00	3.799.840.429,00	3.782.047.671,00	4.422.919.555,00		5.046.086.215,00		0,98
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		535.423.000,00	316.585.000,00	316.585.000,00	316.585.000,00		524.345.350,00		0,98
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		69.933.750,00	50.433.750,00	50.433.750,00	50.433.750,00		63.001.600,00		0,90
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		465.489.250,00	246.151.250,00	246.151.250,00	246.151.250,00		461.343.750,00		0,99
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		0	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		0		0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		284.589.110,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00		212.220.068,00		0,74
Membangun Metadata Statistik Sektoral		284.589.110,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00		212.220.068,00		0,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		514.174.450,00	426.029.450,00	426.029.450,00	426.029.450,00		506.803.338,00		0,98
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		514.174.450,00	426.029.450,00	426.029.450,00	426.029.450,00		506.803.338,00		0,98

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Magelang, maka peranan Diskominfo sangat penting dalam pengelolaan urusan statistik, persandian dan komunikasi informatika mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut maka penyusunan Rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Diskominfo Kabupaten Magelang. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan e- Government dengan rincian masalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan
Pelayanan Dinas
Komunikasi dan
Informatika

MASALAH POKOK PD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
1	2	3
Belum optimalnya pelaksanaan e-Government	Belum optimalnya prasarana dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum semua Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil

1	2	3
		<p>Belum Tersedianya Data Center dan Disaster Recovery Center yang sesuai dengan standar</p> <p>Belum tersedianya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Belum adanya layanan aplikasi berbasis mobile yang terintegrasi</p> <p>Belum optimalnya layanan pengembangan aplikasi terintegrasi pemerintah</p> <p>Belum semua website desa menggunakan domain dengan ekstension desa.id sesuai dengan permen kominfo no 5 tahun 2015</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan dan layanan dasar data center dan DRC plan</p> <p>Belum adanya pusat layanan data warehouse</p>
	<p>Belum optimalnya diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat</p>	<p>Belum semua SKPD melaksanakan amanah keterbukaan informasi publik</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan portal informasi daerah magelangkab.go.id beserta sub-domain OPD dan desa/kelurahan sebagai sarana informasi dan komunikasi publik</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan sub-domain OPD dan desa/kelurahan sebagai sarana informasi dan komunikasi publik</p> <p>Belum tersedianya Pusat Layanan Informasi Publik</p> <p>Keterbatasan Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat</p> <p>Kurangnya pengembangan, pemberdayaan, dan Kemitraan diseminasi informasi publik oleh Forum Komunikasi Media Tradional melalui Pertunjukan Rakyat</p>

1	2	3
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media televisi
		Perangkat siar LPPL Radio Gemilang sudah tidak memadai
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang, dan Videotron
		Belum optimalnya diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media surat kabar
		Belum tersedianya Media Center sebagai media jaringan pemberitaan daerah
		Terbatasnya Jumlah Lembaga Komunikasi Perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif
		Kurangnya pengembangan, pemberdayaan, dan Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial
		Belum tersedianya konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar
	Belum optimalnya pengelolaan data statistik daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Statistika Daerah
		Belum adanya koordinasi terkait pengumpulan data sektoral di SKPD
		Belum optimalnya diseminasi data statistik sektoral
		Belum adanya tata kelola statistik sektoral
		Belum tersedianya sarana dan prasarana statistik
	Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Belum semua Perangkat Daerah menggunakan sandi dalam komunikasi
		Belum optimalnya sarana prasarana persandian
		Belum Tersedianya Sistem Keamanan Jaringan yang sesuai dengan standar

1	2	3
		Belum terbangunnya tata kelola pemerintahan berbasis persandian
		Belum optimalnya pengelolaan layanan telekomunikasi kedinasan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Sebagaimana diketahui bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH). Visi tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi dan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan serta program unggulan atau dikenal dengan istilah dasacita.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang masuk dalam misi ke-tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan mendukung untuk terwujudnya cita ke-delapan yaitu birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkannya Dinas Komunikasi dan Informatika harus menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong dan penghambat sehingga visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi :“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (Sedaya Amanah)					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
Misi Ke- III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah					
Cita Ke- 8 : Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan					
1	2	3	4	5	6
1	E-Government/S mart Regency	Tugas: membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada	Permasalahan Pelayanan Diskominfo a. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi b. Belum	1. Komitmen pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Magelang Cerdas; 2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik; 3. Kebijakan Pemerintah tentang	1. Sumber daya yang terbatas; 2. Belum semua perangkat daerah diarahkan untuk berbasis teknologi informasi; 3. Belum adanya sumberdaya manusia bidang statistik; 4. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/programmer dan tenaga ahli bidang TI

		<p>Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik dan kesekretariatan ;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, Komunikasi informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;</p> <p>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik</p>	<p>tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar</p> <p>c. Belum optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan , Pembangunan dan Layanan Masyarakat</p> <p>d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik</p> <p>e. Belum optimalnya diseminasi informasi publik</p> <p>f. Belum optimalnya pemanfaatandan pengelolaan TI di tingkat masyarakat</p>	<p>SPBE/ e-gov, satu data dan keamanan informasi;4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal; 5. Infrastruktur IT yang sudah cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah.</p>	
2	Peningkatan Pelayanan Publik			<p>1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi;</p> <p>2. Kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik</p>	<p>1. Belum terwujudnya budaya IT;</p> <p>2. Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat;</p> <p>3. Legalitas penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi</p>

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pusat Statistik dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana tabel 3.3. diatas, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sangat mendukung ditingkat lokal terhadap suksesnya sasaran renstra Kementerian dan Lembaga diatas dengan catatan permasalahan dan faktor penghambat dapat diatasi secara bersama-sama/bersinergi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup pola ruang dan struktur ruang di Kabupaten Magelang. RTRW digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap ruang. Demikian pula Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada RTRW yang berlaku yaitu Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Selain RTRW Kabupaten Magelang, hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo adalah isu strategi dan hasil rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dari Pelayanan Diskominfo Kabupaten Magelang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW	Tugas: membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi:		1. Komitmen pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Magelang Cerdas; 2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik; 3. Kebijakan Pemerintah tentang SPBE/ e-gov, satu	1. Prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai 2. Belum adanya sistem satu data untuk mengintegrasikan data sektoral 3. Belum terwujudnya budaya IT
	-				
B	Struktur Ruang RTRW				
	Pasal 16. Kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berupa peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten		Belum optimalnya diseminasi informasi public		

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	Untuk mendukung perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana pasal 56, meliputi: a. Peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat; b. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi serta mendorong terbentuknya jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah kabupaten	a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik dan kesekretariatan; b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik	Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi	data dan keamanan informasi; 4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal; 5. Infrastruktur IT yang sudah cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah.	
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis				
1	Perlunya meningkatkan akses penduduk yang terlayani mobile broadband dan internet		a. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi; b. Belum	1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi; 2. Kebijakan pengelolaan keterbukaan informasi publik	
2	Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon belum tercapai.				

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet belum tercapai		optimalnya integrasi sistem informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Layanan Masyarakat		
4	Perlunya meningkatkan jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya		a. Belum optimalnya diseminasi informasi publik; b. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat		
B	Skenario dan Rekomendasi				
1	Meningkatkan akses penduduk yang terlayani mobile broadband dan internet				
2	Meningkatkan persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon belum tercapai				
3	Meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses internet belum tercapai				
4	Meningkatkan jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya				

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang statistik persandian, komunikasi dan informatika di daerah, maka setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Diskominfo Kabupaten Magelang, maka kedepan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan implementasi *e-Government* (SPBE)
2. Pengembangan *data center* yang didukung jaringan komunikasi data yang aman
3. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah
4. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

Kedepannya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Magelang tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kabupaten Magelang saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep Kabupaten Magelang *Smart city*. Konsep ini akan menempatkan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Kabupaten Magelang *Smart City* juga akan menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas/tertata dan nyaman bagi siapa saja. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik guna mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam isu strategis tata kelola RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati Magelang, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2019– 2024 adalah meningkatnya pelaksanaan e-government. Secara rinci, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ditampilkan pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Kabupaten Magelang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	
				2020		2021	2022	2023	2024		
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4								
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)									
	Meningkatnya pelaksanaan e-government	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	44,68	57,63	53,19	61,70	68,08	76,59	76,59	
		Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD	persen	48,16	53,37	56,89	100	100	100	100	
		Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	84,00	80,18	86,66	100	100	100	100	
		Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	75,06	82,02	83,33	86,81	92,80	100	100	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Adapun arah kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan gunatercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ditampilkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kabupaten
 Magelang Tahun 2019-2024

VISI							
MISI III							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1		2		3		4	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Meningkatnya pelaksanaan e-government	1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan ketersediaan layanan internet dan intranet pemerintah daerah
						2	Mengoptimalkan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana TIK

1		2		3		4	
						3	Meningkatkan kualitas layanan aplikasi e Government yang terintegrasi
				2	Peningkatan diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat	1	Meningkatkan upaya layanan keterbukaan informasi publik
						2	Meningkatkan pengelolaan saluran media informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Magelang
						3	Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Lembaga Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Magelang
				3	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	1	Meningkatkan ketersediaan sistem informasi data statistik daerah
						2	Meningkatkan ketersediaan sistem informasi data statistik sektoral
						3	Meningkatkan ketersediaan sistem informasi data statistik sektoral

1		2		3		4	
						4	Meningkatkan kualitas tata kelola dan ketersediaan sarana prasarana statistik
				4	Peningkatan pengelolaan persandian	1	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi
						2	Meningkatkan ketersediaan sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai standar
						3	Menyusun SOP/peraturan tentang tata kelola keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kab. Magelang
						4	Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi kedinasan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu penjabaran operasional secara lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, maka selanjutnya disusun program dan kegiatan. Pada tahun 2021-2024 Diskominfo Kabupaten Magelang melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi dan Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program dan kegiatan yang disertai dengan target indikator dan kerangka pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi				Indeks SPBE	2,31-2,50 angka (0-5)	0,00	2,51-2,61 angka (0-5)	14.155.610.425,00	na angka (0-5)	10.727.298.844,00	na angka (0-5)	10.709.506.086,00	na angka (0-5)	11.350.377.970,00		
				Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	na angka (0-5)		na angka (0-5)		3,0-3,20 angka (0-5)		3,21-3,40 angka (0-5)		3,41-3,60 angka (0-5)			
	Meningkatnya pelaksanaan e-governm ent			Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	75,06 persen	0,00	83,33 persen	14.155.610.425,00	86,81 persen	10.727.298.844,00	92,80 persen	10.709.506.086,00	100 persen	11.350.377.970,00		
				Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	84,00 persen		86,66 persen		100 persen		100 persen					
				Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD	48,16 persen		56,89 persen		100 persen		100 persen					
				Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	44,68 persen		53,19 persen		61,70 persen		68,08 persen		76,59 persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan perangkat daerah	n/a %	0,00	100 %	6.334.089.733,00	100 %	4.886.470.475,00	100 %	4.886.470.475,00	100 %	4.886.470.475,00		
				2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	n/a %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na persen	0,00	100 persen	6.081.035,00	100 persen	10.000.000,00	100 persen	10.000.000,00	100 persen	10.000.000,00		
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	na dokumen	0,00	2 dokumen	4.924.955,00	4 dokumen	5.000.000,00	4 dokumen	5.000.000,00	4 dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	1.156.080,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na persen	0,00	100 persen	3.723.426.623,00	100 persen	4.181.470.475,00	100 persen	4.181.470.475,00	100 persen	4.181.470.475,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji ASN	na bulan	0,00	12 bulan	3.649.357.303,00	12 bulan	4.100.000.000,00	12 bulan	4.100.000.000,00	12 bulan	4.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah surat keputusan kepala daerah mengenai pengelola keuangan	na dokumen	0,00	1 dokumen	48.300.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan dengan spj terverifikasi	na kegiatan	0,00	11 kegiatan	19.071.160,00	11 kegiatan	81.470.475,00	12 kegiatan	81.470.475,00	12 kegiatan	81.470.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	2.054.740,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	1.123.870,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang tersusun	na dokumen	0,00	2 dokumen	1.659.690,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang tersusun	na dokumen	0,00	3 dokumen	1.446.800,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	413.060,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media elektronik	na persen	0,00	100 persen	2.030.325.250,00	100 persen	131.000.000,00	100 persen	131.000.000,00	100 persen	131.000.000,00		
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah JFT Pranata Komputer yang dinilai	0 orang	0,00	0 orang	0,00	115 orang	31.000.000,00	125 orang	31.000.000,00	135 orang	31.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media elektronik	na %	0,00	100 %	2.030.325.250,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	na persen	0,00	100 persen	41.032.350,00	100 persen	70.000.000,00	100 persen	70.000.000,00	100 persen	70.000.000,00		
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	na kali	0,00	35 kali	41.032.350,00	35 kali	70.000.000,00	35 kali	70.000.000,00	35 kali	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
			2. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	na perjalanan	0,00	75 perjalanan	75 perjalanan		75 perjalanan							
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	na persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00		
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	na unit	0,00	na unit	0,00	na unit	0,00	na unit	0,00	na unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	na paket	0,00	na paket	0,00	na paket	0,00	na paket	0,00	na paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	na persen	0,00	100 persen	245.919.855,00	100 persen	247.000.000,00	100 persen	247.000.000,00	100 persen	247.000.000,00		
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	na surat	0,00	1650 surat	21.999.855,00	2000 surat	22.000.000,00	2250 surat	22.000.000,00	2500 surat	22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan selama satu tahun	na rekening	0,00	48 rekening	223.920.000,00	48 rekening	225.000.000,00	48 rekening	225.000.000,00	48 rekening	225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	na persen	0,00	100 persen	287.304.620,00	100 persen	247.000.000,00	100 persen	247.000.000,00	100 persen	247.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang dipelihara	na unit	0,00	17 unit	180.248.015,00	17 unit	180.000.000,00	17 unit	180.000.000,00	17 unit	180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na paket	0,00	1 paket	75.917.810,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	na meter persegi	0,00	2500 meter persegi	31.138.795,00	2500 meter persegi	47.000.000,00	2500 meter persegi	47.000.000,00	2500 meter persegi	47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Cakupan diseminasi informasi melalui media publik	n/a %	0,00	n/a %	1.346.783.132,00	100 %	1.183.373.490,00	100 %	1.183.373.490,00	100 %	1.183.373.490,00		
				2. Cakupan diseminasi informasi melalui media massa	n/a %	86,66 %	n/a %		n/a %							
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Cakupan desiminasi informasi melalui media publik	na persen	0,00	100 persen	1.346.783.132,00	100 persen	1.183.373.490,00	100 persen	1.183.373.490,00	100 persen	1.183.373.490,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruangan	n/a kali		n/a kali		12 kali		12 kali		12 kali				
				2. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat	n/a kali		12 kali		n/a kali		n/a kali		n/a kali				
				3. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang	n/a kali		12 kali		n/a kali		n/a kali		n/a kali				
				4. Jumlah dokumen perencanaan yang dipublikasikan	n/a dokumen	0,00	3 dokumen	535.779.155,00	n/a dokumen	322.103.555,00	n/a dokumen	322.103.555,00	n/a dokumen	322.103.555,00			
				5. Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM	n/a KIM		22 KIM		n/a KIM		n/a KIM		n/a KIM				
				6. Jumlah website SKPD /desa yang mendapat kriteria cukup informatif	n/a SKPD/desa		72 SKPD/desa		n/a SKPD/desa		n/a SKPD/desa		n/a SKPD/desa				
				7. Partisipasi pemasangan iklan media cetak	n/a tahun		1 tahun		n/a tahun		n/a tahun		n/a tahun				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media publik 2. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak majalah suara gemilang 3. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio 4. Jumlah portal berita beritamagelang.id 5. Pengelolaan LPPL Radio Gemilang	n/a kegiatan n/a eksemplar n/a kegiatan n/a berita n/a jam/hari	0,00	n/a kegiatan 18000 eksemplar 6 kegiatan 2190 berita 19 jam/hari	809.455.944,00	6 kegiatan n/a eksemplar n/a kegiatan n/a berita n/a jam/hari	701.269.935,00	6 kegiatan n/a eksemplar n/a kegiatan n/a berita n/a jam/hari	701.269.935,00	6 kegiatan n/a eksemplar n/a kegiatan n/a berita n/a jam/hari	701.269.935,00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat 2. Jumlah diseminasi dan distribusi informasi ketentuan di bidang cukai tembakau	na kali n/a kali	0,00	0 kali 4 kali	1.548.033,00	3 kali n/a kali	30.000.000,00	3 kali n/a kali	30.000.000,00	3 kali n/a kali	30.000.000,00	DINAS KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	n/a KIM	0,00	n/a KIM	0,00	37 KIM	30.000.000,00	50 KIM	30.000.000,00	60 KIM	30.000.000,00	DINAS KOMUNI KASI DAN	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															INFORMATIKA	
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media surat kabar	n/a surat kabar	0,00	n/a surat kabar	0,00	3 surat kabar	100.000.000,00	3 surat kabar	100.000.000,00	3 surat kabar	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi	n/a %	0,00	n/a %	5.675.974.000,00	100 %	4.116.425.429,00	100 %	4.098.632.671,00	100 %	4.739.504.555,00		
				2. Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	n/a %		n/a %		73,62 %		85,61 %		100 %			
				3. Cakupan PD dan desa/kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	n/a %		60,19 %		n/a %		n/a %		n/a %			
				4. Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	n/a %		20,68 %		n/a %		n/a %		n/a %			
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	na OPD dan desa	0,00	257 OPD dan desa	5.140.551.000,00	307 OPD dan desa	3.799.840.429,00	357 OPD dan desa	3.782.047.671,00	415 OPD dan desa	4.422.919.555,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Cakupan OPD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil 2. Jumlah bandwidth yang disalurkan	na PD dan desa n/a Mbps	0,0 0	257 PD dan desa 670 Mbps	5.140.551.000,00	307 PD dan desa n/a Mbps	3.799.840.429,00	357 PD dan desa n/a Mbps	3.782.047.671,00	417 PD dan desa n/a Mbps	4.422.919.555,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi	na persen	0,0 0	100 persen	535.423.000,00	100 persen	316.585.000,00	100 persen	316.585.000,00	100 persen	316.585.000,00		
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK 2. Jumlah dokumen penilaian mandiri	na persen n/a dokumen	0,0 0	100 persen 1 dokumen	69.933.750,00	100 persen n/a dokumen	50.433.750,00	100 persen n/a dokumen	50.433.750,00	100 persen n/a dokumen	50.433.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan	1. Cakupan layanan pengembangan aplikasi	na aplikasi	0,0 0	n/a aplikasi	465.489.250,00	10 aplikasi	246.151.250,00	12 aplikasi	246.151.250,00	14 aplikasi	246.151.250,00	DINAS KOMUNIKASI	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Jumlah aplikasi perangkat daerah yang terfasilitasi	n/a aplikasi		8 aplikasi		n/a aplikasi		n/a aplikasi		n/a aplikasi		KASI DAN INFORMATIKA	MAGELANG
		2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase desa yang terupdate dalam jelajah magelang	n/a persen	0,00	n/a persen	0,00	65 persen	20.000.000,00	85 persen	20.000.000,00	100 persen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
		2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	48,16 persen	0,00	56,89 persen	284.589.110,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00		
				2. Persentase ketersediaan data statistik	n/a %		100 %		n/a %		n/a %					
		2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	na persen	0,00	100 persen	284.589.110,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00		
		2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1. Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	n/a persen	0,00	n/a persen	284.589.110,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00	100 persen	115.000.000,00		
				2. Jumlah buku metadata statistik sektoral yang tersusun	n/a jenisbuku		9 jenisbuku		n/a jenisbuku		n/a jenisbuku					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a %	0,00	n/a %	514.174.450,00	61,70 %	426.029.450,00	68,08 %	426.029.450,00	76,59 %	426.029.450,00		
				2. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a %		20 %		n/a %		n/a %		n/a %			
		2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	na persen	0,00	20 persen	514.174.450,00	33 persen	426.029.450,00	40 persen	426.029.450,00	48 persen	426.029.450,00		
		2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a %	0,00	n/a %	514.174.450,00	61,70 %	426.029.450,00	68,08 %	426.029.450,00	76,59 %	426.029.450,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jaringan telpon Pemda Kabupaten Magelang	n/a paket		1 paket		n/a paket		n/a paket					
				3. jumlah peralatan sandi, berita sandi dan berita telekomunikasi	n/a berita dan telepon		31800 berita dan telepon		n/a berita dan telepon		n/a berita dan telepon					
				4. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	n/a SKPD		60 SKPD		n/a SKPD		n/a SKPD					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dalam komunikasi perangkat daerah												
				5. Jumlah sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi	n/a paket		2 paket		n/a paket			n/a paket		n/a paket		
				6. Prosentase sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanan dan dan resikonya sesuai SOP	n/a %		100 %		n/a %			n/a %		n/a %		
Jumlah						0,00		14.155.610.425,00		10.727.298.844,00		10.709.506.086,00		11.350.377.970,00		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja PD yang bersangkutan, yaitu spesifik, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan, dapat dicapai, dan relevan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024. Sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Magelang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		Indeks SPBE	2,19-2,30 angka (0-5)	2,31-2,50 angka (0-5)	2,51-2,61 angka (0-5)	3,0-3,20 angka (0-5)	3,21-3,40 angka (0-5)	23,41-3,60 angka (0-5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelaksanaan e-government	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	37,26 persen	44,68 persen	53,19 persen	61,70 persen	68,08 persen	76,59 persen
			Cakupan layanan informasi bagi Desa dan SKPD	41,32 persen	48,16 persen	56,89 persen	100 persen	100 persen	100 persen
			Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	57,36 persen	84,00 persen	86,66 persen	100 persen	100 persen	100 persen
			Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	66,67 persen	75,06 persen	83,33 persen	86,81 persen	92,80 persen	100 persen

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	1. Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	20,84%	36,77%	48,48%	60,19%	N/A	N/A	N/A	0
	2. Cakupan Layanan Komunikasi	73%	75%	75%	77%	N/A	N/A	N/A	0
2	Program Persandian								
	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	0,80%	16,70%	25%	61,70 %	68,08 %	76,59 %	76,59%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
	1. Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA	21,05%	23,68%	34,21%	50%	N/A	N/A	N/A	0
	2. Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	0,27%	0,27%	10,27%	20,68%	N/A	N/A	N/A	0
	3. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	4. Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	100 %	100%
	5. Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	N/A	N/A	N/A	N/A	73,62 %	85,61 %	100 %	100%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik								
	1. Persentase ketersediaan data statistik sektoral	0%	78,94%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0
	2. Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	0%	78,94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
	1. Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria	0%	5,81%	13,63%	26,45%	N/A	N/A	N/A	0
	2. Persentase diseminasi informasi melalui media massa	70%	80%	90%	100%	N/A	N/A	N/A	0
	3. Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	25%	66,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal	0%	58,33%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0
	5. Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	25%	33,33 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0
	7. Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8. Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	25%	33,33%	50%	66,67%	N/A	N/A	N/A	0
	9. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media publik	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
	10. Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui surat kabar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD serta target sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mengakomodir hal-hal yang belum tercantum dalam dokumen Renstra murni. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam dan masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari enstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPД sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan diketahui pula oleh stakeholder.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ENDRA ENDAH WACANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198903 1 008

URUSAN	VISI	MISI	ISU STRATEGIS DAERAH	TUJUAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR TUJUAN DAERAH	MASALAH POKOK DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	FORMULA INDIKATOR SASARAN DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH	Isu Strategis PD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	FORMULA TUJUAN PD	MASALAH POKOK PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA INDIKATOR SASARAN PD	MASALAH	SASARAN PROGRAM	STRATEGI PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	AKAR MASALAH PD	SASARAN KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN UMUM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD PENGGUNAWA B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
UNTUK KERPJMD	BAB V RPJMD	BAB V RPJMD	BAB IV RPJMD	BAB V, VI RPJMD	BAB V, IX RPJMD	BAB IX RPJMD	BAB IV RPJMD	BAB V, VI RPJMD	BAB VI RPJMD	BAB VI RPJMD	BAB VI RPJMD						BAB IV RPJMD	RENSTRA	BAB IX RPJMD	BAB IX RPJMD (IKU PD)	BAB IV RPJMD		RENSTRA	BAB VIII RPJMD										
UNTUK KE RESTRA							ISU STRATEGIS	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	FORMULA TUJUAN							MASALAH POKOK	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	FORMULA SASARAN RENSTRA	MASALAH OPD													
Komunikasi & Informatika	Terwujudnya masyarakat Kabupa-ten Ma-ge- lang yang sejahter- a, berdaya- sains dan amanah (SE DAYA AMANAH)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Peraturan Menteri PAN-RB No. 26 Th. 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Tingkat Kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, <1,8 : Kurang 1,8 – 2,8 : Cukup 2,6 – 3,5 : Baik 3,5 – 4,2 : Sangat Baik 4,2 – 5,0 : Memuaskan	Meningkatkan pelaksanaan e-governmen- t	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Belum optimalnya ketersediaan dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Tingkat Kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum optimalnya pelaksanaan e-governmen- t	Meningkatnya pelaksanaan e-governmen- t	Cakupan pemanfaatan dan pengelolan TI	((Jumlah PD dan Desa atau Kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet dan jaringan intranet dan jaringan intranet pemerintah daerah yang optimal dan stabil)/(Jumlah PD dan Desa atau Kelurahan))*100% + (Jumlah aplikasi PD dan Desa	Belum optimalnya prasarana dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi	program aplikasi informasi	Persepsi Jumlah PD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan intranet pemerintah daerah yang optimal dan stabil	((Jumlah PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan intranet pemerintah daerah yang optimal dan stabil)/(Jumlah PD+Jumlah Desa+Jumlah Kelurahan))*100%	Belum semua Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan intranet pemerintah daerah yang optimal dan stabil	Meningkatnya ketersediaan layanan internet dan intranet pemerintah daerah	Meningkatnya ketersediaan layanan internet dan intranet pemerintah daerah	Keg. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapk- an oleh Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Magelang	Sub. Keg. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	((Jumlah PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil)/(Jumlah PD+Jumlah Desa+Jumlah Kelurahan))*100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode / Indikator Kinerja													Keterangan				
Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran Perangkat Daerah		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		SKPD					
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	6.5	Indeks Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	6.5.1	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	6.5.1.1	Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	6.5.1.1.1	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	6.5.1.1.1.01	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil	15	6.5.1.1.1.01.15				
						6.5.1.2		Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi		6.5.1.2.1		Persentase pengembangan aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi		6.5.1.2.1.01	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	15	6.5.1.2.1.01.15
														6.5.1.2.1.02		Cakupan layanan pengembangan aplikasi	
								6.5.1.2.1.03	Persentase desa yang terupdate dalam jejajah magelang	15	6.5.1.2.1.03.15						
					6.5.2	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	6.5.2.1	Cakupan diseminasi informasi melalui media publik	6.5.2.1.1	Cakupan diseminasi informasi melalui media publik	6.5.2.1.1.01	Cakupan diseminasi informasi melalui media publik	6.5.2.1.1.01	Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruangan	15	6.5.2.1.1.01.15	
													6.5.2.1.1.02		Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media publik		15

								6.5.2.1.1.03	Cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat	15	6.5.2.1.1.03.15
								6.5.2.1.1.04	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	15	6.5.2.1.1.04.15
								6.5.2.1.1.05	cakupan diseminasi dan distribusi informasi melalui media surat kabar	15	6.5.2.1.1.05.15
		6.5.3	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	6.5.3.1	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	6.5.3.1.1	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	6.5.3.1.1.01	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	15	6.5.3.1.1.01.15
		6.5.4	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	6.5.4.1	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	6.5.4.1.1	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	6.5.4.1.1.01	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	15	6.5.4.1.1.01.15